

Kita tak Serius Garap Sistem Kompetisi OR

Oleh AMUNG MA`MUN dan AGUS MAHENDRA

PETA prestasi olah raga Indonesia sedang berada dalam tren menurun. Sejak SEA Games Malaysia (2001), SEA Games Filipina (2003), SEA Games Vietnam (2005), dan terakhir SEA Games Nakhon Ratchasima, Thailand (2007), prestasi Indonesia sudah menunjukkan *declining phase* yang amat terasa. Dalam empat SEA Games terakhir itu, baik dari sisi peringkat maupun dari perolehan jumlah medali (emas), grafik yang tampak tidak pernah beranjak naik kembali.

Demikian juga dalam Asian Games. Prestasi Indonesia sejak tahun 1998 di Bangkok hingga 2006 di Qatar, sama-sama terkena gejala penurunan, terutama jika dibandingkan dengan prestasi yang diraih oleh negara-negara tetangga seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam.

Bahkan, jika bandingannya diperluas dengan mengedepankan olimpiade, terasa sekali penurunan prestasi olah raga Indonesia itu amat memprihatinkan. Indonesia hanya mampu mengandalkan bulu tangkis, yang mulai dipertandingkan pada Olimpiade Barcelona 1992. Jika tidak ada bulu tangkis, mungkin hingga sekarang kita belum memperoleh medali emas di ajang olimpiade.

Mungkin menjadi pertanyaan kita semua, mengapa olah raga kita mengalami penurunan tajam? Jawabannya dapat amat beragam. Mulai dari tuduhan bahwa Indonesia tidak memiliki program makro dalam pembinaan dan kompetisi olah raga hingga pengakuan bahwa Indonesia memang tidak memiliki SDM keolahragaan yang memadai.

Di balik semua kenyataan pahit tersebut, sebenarnya kita dapat mengangkat pelajaran berharga dari PON XVII 2008 Kaltim. Dari banyaknya peristiwa yang timbul dalam PON tersebut, kita dapat merefleksikan bahwa kelemahan-kelemahan itu salah satunya karena tidak seriusnya kita menggarap sistem kompetisi olah raga nasional (SKON), seperti PON, kejurnas, pomnas, dan bahkan popnas.

Artinya, meskipun sistem pembinaan olah raga sudah dirumuskan dan diimplementasikan sedemikian baiknya, prestasi olah raga kita tetap akan terhambat oleh SKON yang masih belum ditata baik.

Dari contoh kasus PON XVII, kita dapat menyimpulkan bahwa sistem kompetisi OR nasional kita dapat dikatakan tidak mendukung proses pembinaan murni daerah yang memiliki atlet.

Mudahnya atlet mutasi dari satu daerah ke daerah lain dan hilangnya idealisme beberapa PB cabor dalam hal jual beli pertandingan, merupakan gambaran nyata bahwa SKON tidak dilindungi oleh ketentuan hukum dan sistem yang berakar pada nilai luhur keolahragaan. Setiap porda atau PON, sekelompok atlet bermigrasi secara besar-besaran. Dari PON ke PON, masalah itu terus dikeluhkan, tanpa ada yang berusaha mencari solusinya melalui perbaikan sistem.

Dari hitung-hitungan sederhana pada 17 dari 43 cabor yang dipertandingkan pada PON XVII, Kaltim telah melibatkan 50 atlet hasil mutasi dari daerah-daerah lain. Dari 17 cabor tersebut, Kaltim memperoleh 28 medali emas dan 15 perak.

Dapat dibayangkan jika hitungan itu melibatkan semua cabor. Akan kita ketahui bahwa hampir 60 persen medali emas Kaltim diperoleh dari atlet yang mutasi secara instan. Jika cara Kaltim ini nanti diikuti oleh calon tuan rumah PON berikutnya (Riau), tidak bisa dibayangkan apa jadinya olah raga kita kelak.

Tanpa guideline yang jelas, PON kemudian akan menjadi gurita raksasa yang menelan korban tanpa pandang bulu. Daerah potensial penghasil atlet lambat laun akan frustrasi dengan kondisi itu, terutama ambisi tuan rumah yang hanya memerhatikan hasil akhir.

Kecenderungan yang tidak kondusif tersebut di antaranya adalah penetapan nomor dan cabor yang seolah tak terkendali dan tidak berorientasi pada event besar di atasnya. Dengan ambisi pemerataan serta ego cabor-cabor olahraga anggota KONI Pusat, nomor-nomor yang dipertandingkan di PON terus bertambah tanpa kendali (lihat table). Bandingkan dengan penambahan jumlah cabor atau nomor di SEA Games, Asian Games, dan olimpiade, yang relatif masih memperlihatkan adanya kendali.

Tabel Jumlah Nomor yang Dipertandingkan pada PON
Dibandingkan dengan nomor pada Events Lain

NO	EVENT	PERIODE TAHUN				
		JAKARTA (1993) 434	JAKARTA (1996) 508	SURABAYA (2000) 553	PALEMBANG (2004) 625	SAMARINDA (2008) 755
2	SEA GAMES	KUALA LUMPUR (2001) 393	MANILA (2003) 444	HO CHI MIN (2005) 444	NAKON Ratchasima (2007) 477	LAOS XXVII/2009 ???
3	ASIAN GAMES	(1994) 335	BANGKOK (1998) 379	BUSAN (2002) 427	QATAR (2006) 428	GUANGZO (2010) ???
4	OLYMPIC GAMES	BARCELONA (1992) 260	ATLANTA (1996) 270	SIDNEY (2000) 298	ATHENA (2004) 301	BEIJING (2008) 303

Masih banyak contoh kasus yang dapat diangkat untuk menunjukkan bahwa kita tidak memiliki sistem kompetisi olah raga yang jelas. Dalam PON, kejurnas, pomnas, dan popnas, tidak ada batasan yang jelas tentang usia atlet. Untuk cabor mungkin sudah ada ketentuan, tapi landasan apa yang mendasarinya?

Di pihak lain, sistem penghargaan terhadap atlet pun belum tersistem. Sementara pihak dunia usaha belum mampu menyediakan pola sponsorship yang jelas bagi atlet melalui sistem kontrak dan bagi hasil iklan model-model produk industri olah raga. pemerintah belum menetapkan reward system yang memadai.

Kondisi ini berakibat pada tidak konsistennya pembinaan atlet dalam jangka panjang sehingga mengarah pada tidak jalannya pembinaan di daerah. Lalu, para atlet hanya berharap dari bonus dan pemberian penghargaan yang selalu digembargemborkan pemerintah daerah pada setiap kali PON atau porda. Karena besaran bonus tidak ada patokannya, setiap daerah seolah berlomba-lomba menetapkan besaran bonus yang jorjoran.

Dengan menyadari persoalan tersebut, dapat diyakini bahwa banyak hal harus dilakukan untuk mengubahnya. Keberhasilan kita semua melakukannya akan berdampak positif secara nyata kepada sistem pembinaan olah raga secara keseluruhan. Pada gilirannya akan mendongkrak prestasi olah raga Indonesia di masa-masa yang akan datang. ***

Penulis, pengurus KONI Jawa Barat.